

INTI: JARINGAN PERJUANGAN ORANG CINA- INDONESIA DI ERA PASCA REFORMASI

Dewik Untarawati

Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia

untarawati@gmail.com

ABSTRACT

Chinese-Indonesians have long been the subject of discrimination and racism since the colonial period which lasted until the regime of Indonesia's second president, Soeharto, later known as the New Order Era. Soeharto enacted the policy of assimilation which they were not allowed to have Chinese identity and should abandon their cultural heritage. The May '98 Tragedy was the turning point to realize that their rights have been violated. After the Reformation, some groups of Chinese-Indonesians tried to voice their rights to seek justice as part of Indonesian citizens by forming the Chinese-Indonesian Association, or INTI. The organization aims to resolve Chinese-related issues, especially the issue of discrimination that has long been experienced by Chinese Indonesians. This paper will explore further the issues faced by Chinese Indonesians, what efforts they have made to solve the problems and the results of their struggle to get their rights back. The study uses a series of interviews with the founders of the Chinese Indonesian Association and literature studies related to this topic. The results of this study indicated that Chinese Indonesians faced some issues related to discrimination and racism in many facets of life including, politics, economy, society, and culture. Through the formation of INTI as a channel to voice their aspirations as well as to negotiate with a wide range of influenced figures, the government eventually enacted policies to restore their rights as Indonesian citizens.

Keywords: *Chinese-Indonesia Association; INTI; Tionghoa; Discrimination; Reformation.*

PENDAHULUAN

Etnis Tionghoa telah lama tinggal di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan catatan sejarah, imigran Cina telah datang ke Nusantara sejak abak ke-7 M. Mayoritas imigran tersebut adalah laki-laki karena Wanita dilarang keluar dari Cina. Beberapa kelompok imigran laki-laki yang datang ke Nusantara disebabkan oleh faktor seperti berdagang, melarikan diri dari perang, bencana alam, hingga kemiskinan yang menyebabkan mereka keluar dari negara asalnya. Mereka kemudian menikah dengan wanita bumiputera dan berbaur dengan masyarakat lokal lainnya.¹ Pernikahan campuran antara imigran Cina dan

¹Widjajanti W. Dharmowidjono, "Not our fate : Reseacher unearths roots of racism against Chinese-Indonesians" (<https://www.thejakartapost.com/life/2021/05/26/not-our-fate-researcher-unearths-roots-of-racism-against-chinese-indonesians.html>), Diakses pada 11 Februari 2024, 10.57)

wanita bumiputera tersebut melahirkan keturunan yang kita kenal dengan istilah “peranakan”². Istilah tersebut kemudian tidak hanya dimaknai secara etnis namun, juga budaya secara lebih luas. Budaya peranakan merupakan hasil akulturasi antara budaya Cina dengan budaya masyarakat lokal.

Etnis Tionghoa atau peranakan mendapatkan tantangan ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda menerapkan politik *divide et impera* (*divide and rule*) yang selanjutnya menjadi awal lahirnya diskriminasi dan rasisme terhadap etnis Tionghoa. Salah satu diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa adalah *wijkenstelsel* atau aturan tentang segregasi wilayah dimana etnis Tionghoa hanya diizinkan tinggal di wilayah tertentu, biasanya disebut sebagai peCinan. Mereka juga dilarang untuk mengadakan kawin campur dengan etnis lainnya. Berdasarkan fakta di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan *divide et impera* cukup berpengaruh terhadap terciptanya eksklusivisme dan kesenjangan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal sampai Indonesia merdeka.

Isu-isu diskriminasi etnis Tionghoa menjadi sebuah perhatian kembali ketika Indonesia diperintah oleh Soeharto. Tanda-tanda awal munculnya diskriminasi adalah Ketika Angkatan Darat mengadakan seminar pada bulan Agustus 1966 dimana seminar tersebut kemudian memutuskan bahwa istilah Tionghoa mengacu pada peranakan Cina di Indonesia, dan Tiongkok mengacu pada negara Cina, keduanya diganti dengan istilah “Cina”. Alasan yang mendasari digunakan istilah Cina daripada Tionghoa supaya menghilangkan rasa inferior pada masyarakat bumiputera, dan sebaliknya menghilangkan rasa superior masyarakat Tionghoa di Indonesia. Penyebutan istilah Cina yang ditujukan untuk peranakan Cina dianggap sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan, Apalagi pemerintahan Soeharto memaksakan Cina sebagai istilah resmi yang digunakan untuk menyebut bangsa Cina.³

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan asimilasi atau peleburan etnis Tionghoa ke dalam budaya masyarakat bumiputera. Kebijakan yang diberlakukan oleh Soeharto merupakan wujud dari kampanye *shinophobia* atau kampanye anti-Tionghoa yang disponsori oleh asing terutama Amerika Serikat dan Inggris. Kebijakan anti-Tionghoa juga merupakan wujud yang paling nyata dari politik de-Sukarnoisme di bidang politik luar negeri

² Matheos V.Messakh, “The tale of peranakan” (<https://www.thejakartapost.com/news/2009/01/22/the-tale-peranakan039.html>), Diakses pada 11 Februari 2024, 10:50)

³ Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Tionghoa Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 194-195.

yang dijalankan Soeharto melalui pemutusan hubungan diplomatiknya dengan RRC.⁴ Kebijakan yang sarat sentiment dan diskriminasi mencapai puncaknya pada peristiwa Kerushan Mei 1998 yang terjadi di Solo dan Jakarta secara besar-besaran. Kerusuhan tersebut ditandai dengan pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan wanita Tionghoa yang dilakukan secara sistematis.

Kerusuhan Mei 1998 menimbulkan persepsi bahwa etnis Tionghoa adalah kambing hitam penyebab krisis massal.⁵ Dalam buku Benny G.Setiono “Tionghoa Dalam Pusaran Politik” dijelaskan bahwa pemerintahan Soeharto telah mempergunakan orang-orang Tionghoa kepercayaannya untuk dimanfaatkan sebagai mesin pencetak uang dan sapi perahan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Hal itulah yang kemudian menjadi penyulut kemarahan masyarakat bumiputera.⁶ Penderitaan yang dialami etnis Tionghoa tersebut kemudian menyadarkan mereka bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang harus memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setelah reformasi bergulir, masyarakat Tionghoa mulai berani untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui berbagai macam organisasi dan partai politik. Salah satu organisasi yang dibentuk pasca reformasi adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lika-liku Menuju Pendirian Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI)

Sebelum Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) terbentuk, tercatat ada dua organisasi Tionghoa di Indonesia yang telah lebih dulu ada. Keduanya memiliki visi-misi yang kurang lebih sama yakni, sebagai wadah atau sarana etnis Tionghoa dalam mengkonsolidasikan berbagai macam permasalahan baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Organisasi-organisasi tersebut juga dijadikan sebagai ajang untuk saling memupuk solidaritas diantara etnis Tionghoa di Indonesia. Organisasi pertama yang terbentuk sebagai reaksi peristiwa kerusuhan di Jakarta adalah Forum Masyarakat Demokrasi atau (FORMASI). Formasi terbentuk berselang setengah bulan setelah kerusuhan mei, kira-kira pada awal bulan

⁴Victor Silaen, “Cina Jadi Tionghoa”, dalam *Reformat*, 1-30 April 2014, hlm 6.

⁵Hilman Latif dan Zezen Zainal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan : Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, (Jakarta : Sewrambi, 2015), hlm 272.

⁶Benny.G.Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, (Jakarta : Transmedia, 2008), hlm 181.

juni 1998 dimana Kristianto Wibisono diangkat sebagai Ketua Umum Formasi. Pendirian Formasi tersebut memiliki tujuan untuk menuntut hak-hak masyarakat Tionghoa sebagai warga negara Indonesia (WNI). Salah satu hak yang mereka perjuangkan diantaranya, mendapatkan keadilan di depan hukum. Etnis Tionghoa merasa bahwa kerusuhan Mei merupakan pelanggaran atas hak-hak setiap manusia sehingga, dengan terbentuknya Formasi diharapkan mampu menjadi aspirasi etnis Tionghoa di Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Namun belum lama berjalan, ketua Formasi yakni, Kristianto Wibisono mendapatkan teror sehingga memutuskan untuk keluar dari Formasi.⁷

Setelah Formasi tidak berjalan, beberapa etnis Tionghoa, termasuk Nancy Widjaja, Eddie Lembong, Gilbert Wiryadinata, Kuncoro Wibowo, Effie Sari memutuskan untuk membentuk organisasi baru yakni, PMSTI (Persatuan Marga Sosial Tionghoa Indonesia) yang ditujukan khusus untuk pedagang-pedagang Tionghoa di Glodok pada awalnya, namun keanggotaannya kemudian bersifat lebih luas atau dengan kata lain, tidak hanya mengambil dari kalangan pengusaha Tionghoa, namun juga dari kalangan akademisi, bahkan juga dari kalangan militer. PSMTI diketuai oleh seorang Purn. Jenderal Teddy Jusuf yang berasal dari kalangan militer. Dalam wawancara saya bersama Nancy Widjaja (74 tahun) memberikan keterangan sebagai berikut.

“Nah, antara pedagang-pedagang, terutama pedagang yang di Glodok kita bikin PSMTI, tetapi kan kalau pengusaha semua masih politic-phobia, semua takut, siapa yang mau jadi ketua, gak ada yang mau”⁸ terkait alasan tersebut, Gilbert Wiryadinata (74 tahun) menambahkan, “udah tau nama ketuanya, Teddy Jusuf, saya bilang nih salah alamat nih, saya bukannya anti-tentara, tapi kita gak perlu Ketua Umum tentara. Mau ngapain ?, Nah inilah dasar ketakutan orang Tionghoa wah kalau tentara dia jadi kuat gito loh”⁹.

Penunjukan Purn. Jenderal Teddy Jusuf sebagai Ketua Umum PSMTI disebabkan ketakutan sebagian besar etnis Tionghoa atas situasi yang belum sepenuhnya stabil di dalam negeri dan juga didasari oleh gagalnya organisasi sebelumnya, Formasi, yang tidak diketahui kelanjutannya setelah Ketua Umum Kristianto Wibisono mengundurkan diri karena ancaman terror dari pihak luar. Sehingga, sebagian besar etnis Tionghoa merasa aman jika kemudian PSMTI mengambil ketua umum dari kalangan militer. Melihat kondisi politik di dalam negeri

⁷ Wawancara dengan Nancy Widjaja, 25 April 2017.

⁸ Wawancara dengan Nancy Widjaja, 25 April 2017.

⁹ Wawancara dengan Gilbert Wiryadinata, 10 April 2017.

yang belum stabil, maka organisasi PSMTI hanya membatasi ruang geraknya pada bidang sosia. Setelah beberapa waktu berjalan, PSMTI dirasakan oleh beberapa anggotanya bersifat pasif, tidak progresif, dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa.

Setelah kondisi politik sudah cukup stabil, beberapa orang yang tergabung dalam PSMTI yang juga merupakan mantan anggota Formasi seperti, Edi Lembong, Effie Sari, Gilbert Wiryadinata, Judi.W.Leonardi, Karta Winata, Kuncoro Wibowo, Michael Purnama Utama, Nancy Wijdjaja, Ronald Sjarif, dan Tjandra Widjaja Wong memutuskan keluar dari organisasi PSMTI dan kemudian sepakat untuk membentuk organisasi baru untuk masyarakat Tionghoa yang diharapkan mampu menyelesaikan semua permasalahan etnis Tionghoa yang dibawa sejak pemerintahan Soekarno.

Tekad mereka semakin kuat untuk mendirikan organisasi baru Ketika beberapa orang dari kelompok etnis Tionghoa mengikuti doa bersama dengan K.H.Abdurahman Wachid (Gus Dur) di Ciganjur dimana Gus Dur mengatakan, “Kalian jangan mau jadi second citizen, kalian harus menunjukkan identitas kalian”. Perkataan Gus Dur tersebut menyadarkan mereka akan identitas mereka sebagai bangsa Indonesia. Perasaan mereka sebagai bagian dari Indonesia semakin kuat setelah mereka mengadakan seminar di kediaman Eddie Lembong. Seminar tersebut mengundang Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dorojatun Kuncoro Jakti dimana dalam pidatonya menyatakan “*If you don't hand together, you'll hang saparetely*” yang berarti bahwa “Kalau kalian tidak mau bergandengan tangan dengan suku-suku yang lain dan tetap eksklusif, nanti akan digantung sendiri-sendiri”.¹⁰ Melalui rangkaian peristiwa penting tersebut, akhirnya mereka bertekat untuk mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).

Pembentukan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Periode Pertama (1999-2003)

Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1999 oleh 17 Warga Negara Indonesia yang peduli terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan Tionghoa.¹¹ Perhimpunan Indonesia-Tionghoa merupakan sebuah organisasi

¹⁰ Wawancara dengan Nancy Widjaja, 25 April 2017.

¹¹ Pada mulanya, para pendiri organisasi Perhimpunan Indonesia-Tionghoa berjumlah 17 orang, namun kemudian ada 1 orang lagi yang menyatakan bergabung dengan Perhimpunan Organisasi Indonesia Tionghoa, hingga kemudian jumlahnya menjadi 18 orang. Menurut pemaparan Bpk. Gilbert

yang maju, modern, bercitra internasional, bersifat kebangsaan sesuai semangat Mukadimah UUD Republik Indonesia 1945 yakni, bebas, egaliter, pluralis, inklusif, demokratis, tidak bernaung atau mengikatkan diri pada salah satu partai politik.¹² Visi yang telah ditentukan tersebut berusaha dicapai dengan melibatkan diri dalam berbagai aspek kehidupan dengan harapan mempertahankan eksistensinya.

Pada awal pembentukannya, beberapa penggagas Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) berupaya melakukan beberapa terobosan, termasuk juga menggalang dukungan dan kerjasama dengan berbagai macam instansi seperti, pemerintah dan masyarakat luas. Dukungan pemerintah atas berdirinya organisasi ini diperlihatkan melalui berbagai upaya seperti, menyediakan tempat-tempat pertemuan atau rapat bagi organisasi dan membantu memperkenalkan organisasi INTI ke dunia internasional, khususnya Amerika melalui Duta Besar Indonesia Amerika Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Retno L.P.Marsudi ketika masih menjabat sebagai Direktur Eropa dan Amerika. Kedua orang ini membantu menyebarkan majalah INTI yang dibuat oleh Benny.G.Setiono di beberapa kota besar di Amerika seperti Los Angeles, San Fransisco, Austin, dan Seattle.¹³

Beberapa penggagas INTI berfikir bahwa untuk mencapai tujuan, mereka harus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah dan masyarakat luas. Sehingga mereka mencoba menjalin hubungan dengan presiden, menteri, maupun para akademisi seperti Ong Hok Ham, Sudjati Djwandono, maupun dengan tokoh agama seperti Ketua PBNU, ICMI, dan Muhammadiyah. Hubungan baik yang dibangun INTI ternyata memberikan dampak positif yakni, membuat INTI menjadi organisasi yang terus eksis hingga saat ini.

Sementara itu, visi untuk menjadi organisasi yang inklusif dapat dikatakan tercapai karena INTI tidak hanya menggalang anggota dari kelompok Tionghoa, namun juga dari kalangan masyarakat luas. Namun demikian timbul kritik dari individu di luar INTI bahwa INTI hanya memperjuangkan hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia dan cenderung bersifat eksklusif, bukan inklusif. Hal tersebut mungkin ada benarnya karena keanggotaan INTI memang didominasi oleh etnis Tionghoa, sehingga kepentingan mereka lebih dominan

Wiryadinata, 17 orang pendiri awal INTI tersebut disesuaikan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia yakni, tanggal 17 Agustus 1945.

¹² inti.or.id, diakses tanggal 20 Maret 2017.

¹³ Wawancara dengan Gilbert Wiryadinata, 10 April 2017.

daripada kelompok etnis lain.¹⁴ Selain itu, dalam buku kenangan “Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia-Tionghoa”, Ketua Umum Eddie Lembong menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa kebanyakan masih bersifat inward looking sehingga sejak awal berdirinya Perhimpunan Indonesia-Tionghoa, penyelesaian terhadap isu-isu Tionghoa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan holistic yakni, melalui kerjasama antara etnis Tionghoa dengan elemen masyarakat dan pemerintah sehingga, mengurangi gap yang membelenggu hubungan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat bumiputera di Indonesia.¹⁵

Pembentukan INTI sebenarnya ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia menuju terwujudnya kebangsaan Indonesia yang kokoh, rukun, bersatu dalam keharmonisan, bhinneka, saling menghargai, dan saling percaya. INTI memiliki misi untuk berperan aktif dalam dinamika proses pembangunan bangsa, antara lain penuntasan masalah etnis Tionghoa di Indonesia.¹⁶ Melalui tujuan, visi, dan misinya diketahui bahwa INTI merupakan organisasi yang beraliran nasionalis. INTI ingin menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa di Indonesia dengan cara menumbuhkan terlebih dahulu nilai-nilai dan perasaan nasionalisme kepada bangsa Indonesia.

Menurut Michael Purnama Utama (73 tahun) selaku SekJen INTI periode pertama 1999-2003, menyatakan bahwa nama Perhimpunan Indonesia-Tionghoa sendiri merupakan nama yang diberikan oleh K.H. Abdurachman Wachid selaku anggota kehormatan INTI bersama dengan K.H. Said Aqiel Siradj. Melalui wawancara, beliau menyatakan,

“Gus Dur yang memberi nama Perhimpunan Indonesia-Tionghoa karena waktu itu ada Lembaga Indonesia-Amerika (LIA), waktu Mendagri menyuruh mengganti nama perhimpunan itu dengan menyelipkan kata “Keturunan” menjadi “Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa”, Gus Dur pulalah yang menyuruh untuk menghapus kata “Keturunan” dan hanya menjadi “Perhimpunan Indonesia-Tionghoa”.¹⁷

¹⁴ Saran yang diberikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Sejarah Lisan dalam menanggapi presentasi “*Dinamika Perhimpunan Indonesia-Tionghoa di Jakarta tahun 1999-2003*”, pada tanggal, 22 Mei 2017.

¹⁵ “*Catatan Pendiri*” dalam Buku Kenangan “*Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan 1999-2009*”, (Jakarta : INTI, 2009), hlm 77.

¹⁶ inti.or.id; Buku Kenangan “*Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan 1999-2009*”, (Jakarta : INTI, 2009), hlm 77.

¹⁷ Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.

Jasa-jasa Gus Dur memang sangat besar bagi Perhimpunan Indonesia-Tionghoa. Dukungan yang diberikan Gus Dur tidak hanya dalam bentuk moral, namun juga mental untuk etnis Tionghoa. Pada saat awal pembentukannya INTI menjadi organisasi pertama yang diundang Gus Dur di Istana Merdeka ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden. Simpati Gus Dur atas etnis Tionghoa mungkin juga disebabkan oleh latarbelakangnya yang juga merupakan keturunan Tionghoa dimana Gus Dur merupakan keturunan etnis Tionghoa dengan marga “Tan” dan dengan nama toinghoa “Tan Kim Ham”.¹⁸

Pengobatan Tradisional di Mangkunegaran

Ketua Umum INTI pada periode pertama adalah Drs. Eddie Lembong. Pada masa kepengurusannya, INTI memiliki 4 program utama yakni, bidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Nancy Widjaja menjelaskan secara detail mengenai program INTI sebagai berikut,

“Di bidang politik INTI harus menjadi organisasi yang anti-diskriminasi, membantu menegakkan demokrasi, dan juga harus melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Kemudian di bidang ekonomi, INTI juga membantu UKM-UKM karena kebanyakan etnis Tionghoa bergerak di bidang UKM, Kita harus mengajarkan suku lain untuk berwirausaha. Bank juga tidak akan mau memberi dana dalam jumlah besar Nah, kita membantu masyarakat lain untuk mendirikan UKM. Itu seperti *affirmative action* yang kita dapat lakukan. Kemudian di bidang sosial, kita memiliki Tim Medis INTI dibawah dr. Lie dimana kita juga mengadakan ratusan kali baksos, membagi kacamata, membantu mendirikan rumah sakit terapung di Kepulauan Kei Kecil dan Kei Besar. Selanjutnya, di bidang pendidikan , INTI membantu mendirikan beberapa kelas pada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan renovasi sekolah”.¹⁹

Empat program utama yang menjadi tujuan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), pada tahun 2003 berkembang menjadi bagian yang lebih luas dalam beberapa seksi yakni, seksi organisasi, seksi kaderisasi, seksi hukum, advokasi, dan perundang-undangan, seksi penelitian dan pendidikan, seksi hubungan masyarakat, institusi, masyarakat & organisasi, seksi hubungan dengan organisasi Tionghoa, seksi hubungan luar negeri, seksi seni budaya dan olahraga, seksi sosial dan kesehatan, seksi pendanaan dan usaha, dan seksi publikasi dan penerbitan.

Masalah Diskriminasi dan Penyelesaiannya

Politik asimilasi yang diberlakukan pada masa pemerintahan Soeharto, jelas memiliki tendensi untuk mengintegrasikan masyarakat bumiputera dan etnis Tionghoa sehingga harapan dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah tidak ada perpecahan ataupun persengketaan yang

¹⁸ Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.

¹⁹ Wawancara dengan Nancy Widjaja, 25 April 2017; Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.

terjadi antara masyarakat bumiputera dan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Politik asimilasi tersebut ditekankan pada tiga hal yang mendasar yakni organisasi, media masa, dan sekolah yang dihapuskan secara paksa melalui berbagai peraturan. Tiga hal tersebut merupakan pilar budaya masyarakat Tionghoa yang dilarang oleh pemerintah. Misalnya saja pada pilar pertama yakni, organisasi. Pemerintah melarang segala bentuk pendirian organisasi yang mengarah pada kehidupan politik. Hal ini berarti masyarakat Tionghoa dilarang untuk berserikat dan berkumpul, apalagi mengungkapkan aspirasinya. Hak untuk berpendapat sangat dibatasi dan menjadi sebuah ancaman yang nyata jika mereka bersuara.²⁰ Sehingga masyarakat Tionghoa benar-benar terkungkung dalam pemerintahan otoriter yang keras.

Kemudian pilar kedua, media masa yang menjadi organ atau sumber aspirasi masyarakat Tionghoa juga dibatasi bahkan dilarang secara total, apalagi surat kabar yang menggunakan bahasa Cina. Kemudian pilar ketiga, sekolah-sekolah Tionghoa juga dilarang menggunakan bahasa mandarin yang merupakan bahasa nasional RRC. Diberlakukannya politik asimilasi sebenarnya untuk membaurkan masyarakat bumiputera dengan etnis Tionghoa dengan cara meleagalkan perkawinan campur diantara keduanya. Namun, hasilnya tidak semakin mempersatukan, sebaliknya, politik asimilasi bahkan menunjukkan jurang perbedaan yang nyata antara masyarakat bumiputera dan Tionghoa. Dampak penerapan kebijakan asimilasi ini menimbulkan praktik-praktik diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Tionghoa seperti agama, pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Pada aspek agama, etnis Tionghoa diharuskan untuk mengganti agama karena agama Konghuchu dilarang dan tidak dilegalkan di Indonesia. Mereka harus memilih salah satu agama dari kelima agama yang diberlakukan di Indonesia. Sehingga, banyak etnis Tionghoa yang kemudian mengubah agama mereka menjadi agama Budha yang memiliki sedikit kedekatan dengan agama Khonghuchu. Pada aspek Pendidikan, pemerintah membatasi kuota untuk etnis Tionghoa yang ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi negeri. Akibat dari kebijakan ini, memunculkan gagasan dari etnis Tionghoa di Indonesia untuk mendirikan sekolah atau perguruan tinggi swasta sehingga, mereka tidak akan bergantung lagi dengan sekolah negeri. Pada aspek politik. Tidak adanya hak untuk bersuara dan berorganisasi dalam wujud pendirian partai politik. Diskriminasi pada aspek sosial dan budaya terlihat ketika etnis Tionghoa diminta untuk mengganti nama keluarga (*family name*) dengan nama Indonesia dan anjuran untuk

²⁰ Frans H Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara , 2009), hlm 112

mengintegrasikan budaya dan bahasa dengan cara mengadakan interaksi dan melakukan perkawinan campur dengan masyarakat bumiputera.²¹ Sementara pada aspek kebudayaan, budaya Tionghoa seperti liong dan barongsai dilarang untuk dipentaskan pada saat perayaan atau upacara ritual keagamaan. Pada aspek hukum, diskriminasi rasial tertera dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat.²²

Diskriminasi lainnya juga terlihat pada bidang administrasi dan birokrasi seperti sulitnya mendapatkab KTP, passport, dan dokumen-dokumen sipil lainnya. Diskriminasi yang tampak sekali dalam urusan birokrasi adalah dalam pembuatan KTP dimana dalam KTP tersebut tercantum simbol-simbol tertentu yang sifatnya diskriminasi. Michael Purnama Utama, Sekjen INTI pertama menjelaskan diskriminasi tersebut.

“KTP kita didiskrimasi waktu itu dikasih kode “00”, kode “00” itu maksudnya Tionghoa. Saya minta punya Gus Dur saya tunjukan Rudini, Pak Rudini dulu Menteri Dalam Negeri. “Pak ini apa?”. Kan kita penasihat Pak Harto harus mengkritik kalau ada yang gak bener, “Kok ada diskriminasi?” memang saya perhatikan ini, memang betul bulan depan dihapus, tapi diganti oleh “titik-titik” Dan titik-titik sama aja bohong, dulu “00” sekarang “..” ya sami wamon”²³

Selanjutnya adalah stereotipe negatif yang terdapat dalam istilah “Cina” yang sudah berpuluh-puluh tahun terbentuk. Panggilan “Cina” untuk etnis Tionghoa dianggap suatu hal yang merendahkan atau bernada pelecehan maka yang menjadi tuntutan etnis Tionghoa selanjutnya adalah mengganti panggilan “Cina” dengan panggilan lain yang lebih pantas yakni, “Tionghoa”. Dalam wawancara saya kepada Michael Purnama Utama menyatakan bahwa permasalahan utama yang diperjuangkan pertama kali adalah pengakuan terhadap identitas mereka seperti halnya penggunaan istilah “Cina” daripada “Tionghoa”. Sebutan “Cina” dapat dikatakan sebagai tidak diakuinya identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.²⁴

Perjuangan mereka untuk diakui identitasnya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dilakukan dengan diplomasi dan membangun hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat mulai dari presiden, menteri, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, hingga masyarakat biasa pada umumnya.

²¹ Victor Silaen, “Cina Jadi Tionghoa”, dalam *Reformat*, April 2014.

²² Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Tionghoa Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2010), hlm 205.

²³ Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.

²⁴ Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.

“Sebenarnya, terus terang yang berjasa dan banyak membantu kami adalah Presiden Gus Dur. Pada waktu dia menjabat sebagai presiden, organisasi pertama yang diundang di istana itu siapa? INTI. Kita berjuang supaya mendapatkan identitas kita, terus akhirnya dikabulkan semua to, diakui, undang-undangnya ada to, Barongsai boleh, Bahasa Mandarin boleh, Metro TV ada to, semua diakui”.²⁵

Petikan wawancara di atas menyatakan bahwa pada masa kepengurusan INTI periode pertama, pengurus INTI termasuk para pendiri seperti, Michael Purnama Utama dan Gilbert Wiryadinata telah menjalin hubungan dekat dengan KH. Abdurahman Wachid. Sehingga melalui hubungan baik tersebut, Presiden Abdurahman Wachid berperan besar dalam menghapuskan setidaknya 66 peraturan yang sifatnya diskriminatif yang terdapat baik dalam Keputusan Presiden (Keppres) maupun Undang-Undang Dasar.

Selain menjalin hubungan dekat dengan pemerintah, INTI juga menjalin hubungan dengan institusi agama Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan ICMI, yang mana tujuannya adalah untuk menggalang perdamaian dan menciptakan suasana persaudaraan dengan kelompok masyarakat muslim. Upaya tersebut juga dilakukan sebagai salah satu bentuk untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi dalam hubungan antara etnis Tionghoa dengan etnis lain, khususnya etnis Jawa muslim sehingga dengan demikian dapat meminimalisir prasangka negatif masyarakat bumiputera terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Ketika INTI mengadakan peringatan yang ke-10 pada tahun 2009 silam, Eddie Lembong memberikan pandangannya mengenai bagaimanakah perjuangan dan pencapaian yang telah dicapai oleh kelompok etnis Tionghoa dalam menyelesaikan masalah diskriminasi melalui INTI. Pencapaian yang telah dicapai selama kepengurusan Perhimpunan Indonesia-Tionghoa periode pertama adalah,

- 1) Dipulihkannya Hak-hak Budaya Etnis Tionghoa. Budaya adalah roh suatu masyarakat, suatu etnis, dan suatu bangsa. Dipulihkannya hak budaya Tionghoa telah membawa etnis Tionghoa menikmati kembali rohnya yang telah lama hilang.
- 2) Diundangkannya 3 undang-undang yang sangat penting yakni,
 - Undang-undang RI No. 12 tertanggal 1 Agustus 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - Undang-undang RI No. 23 tertanggal 29 Desember 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan

²⁵ Wawancara dengan Michael Utama Purnama, 11 April 2017.

- Undang-undang RI No. 40 tertanggal 10 November 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Walaupun Undang-undang tersebut dikeluarkan satu tahun setelah masa kepengurusan Eddie Lembong berakhir yakni tahun 2005, namun diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan buah perjuangan pada masa kepengurusannya. Menurut Eddie Lembong, disahkannya ketiga undang-undang tersebut juga berarti permasalahan etnis Tionghoa bisa dianggap telah selesai.²⁶

Namun demikian, diundangkannya ketiga undang-undang tersebut bukan berarti masalah diskriminasi telah hilang sepenuhnya. Masih ada “diskriminasi sosial” yang mana telah hidup lama pada masyarakat dan tidak bisa dihapuskan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, etnis Tionghoa harus bergandengan tangan dengan semua komponen bangsa lainnya. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan penyerbukan silang antar budaya (*cross culture fertilization*) dimana etnis Tionghoa bukan hanya mengambil nilai-nilai lokal, namun mereka juga berperan dalam membagikan nilai-nilai budaya Tionghoa seperti manajemen dalam kewiraswastaan maupun keterampilan dalam berdagang dan berbisnis, Upaya lainnya adalah memberantas kemiskinan melalui jalur pendidikan serta mengupayakan terciptanya ekonomi yang adil dan bebas dari korupsi. Selain itu juga perlu diupayakan perbaikan terhadap sistem-sistem sosial yang ada dengan tujuan menghapuskan kesenjangan dan segregasi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya.²⁷

KESIMPULAN

Pembentukan organisasi Perhimpunan Indonesia Tionghoa merupakan suatu bentuk reaksi atas peristiwa Kerusushan 13-14 Mei 1998. Sebelum Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) terbentuk, terdapat dua organisasi yakni, FORMASI (Forum Masyarakat Demokrasi) dan PSMTI (Persatuan Marga Sosial Tionghoa Indonesia) yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI). Sebagai sebuah organisasi, INTI bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh etnis

²⁶ “Catatan Pendi” dalam Buku Kenangan “*Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan 1999-2009*”, (Jakarta : INTI, 2009), hlm 78-80.

²⁷ Buku Kenangan “*Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan 1999-2009*”, (Jakarta : INTI, 2009), hlm 80.

Tionghoa sejak masa Orde Lama hingga berakhirnya rezim Orde Baru. Permasalahan pertama yang perlu diperjuangkan pertama kali adalah masalah diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia. Gus Dur merupakan orang yang berperan besar terhadap dihapuskannya peraturan-peraturan diskriminasi untuk etnis Tionghoa. Melalui kerjasama yang dibangun di hampir semua elemen penting seperti pemerintah, istitusi atau lembaga keagamaan, hingga masyarakat luas pada umumnya. Satu persatu permasalahan diskriminasi etnis Tionghoa dihapuskan. Puncaknya adalah ketika di undangkannya 3 undang-undang yang menghapuskan setiap bentuk diskriminasi etnis Tionghoa menjadi sebuah pencapaian penting pada kepengurusan Perhimpunan Indonesia Tionghoa periode pertama di bawah Bapak Drs. Eddie Lembong, Apt. yang menjabat dari tahun 1999-2005.

REFERENSI

- Kerjasama Proyek Penelitian dan Pengembangan Politik Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI dan Universitas Sumatera Utara, “Normalisasi Hubungan Diplomatik Antara RI-RRC Kerjasama dan Tantangannya”. Jakarta: Kerjasama Proyek Penelitian dan Pengembangan Politik Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI dan Universitas Sumatera Utara, 1990.
- Latif, Hilman & Mutaqin, Zezen Zainal. *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, Jakarta: Sewrambi, 2015.
- Matheos V.Messakh. “The tale of peranakan”, diakses pada 11 Februari 2024 dari <https://www.thejakartapost.com/news/2009/01/22/the-tale-peranakan039.html>, (22 Januari 2009).
- Nordholt, Henk Schulte; Purwanto, Bambang; Saptari, Ratna. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Setiono, Benny G. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Transmedia, 2008.
- Suryadinata, Leo. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Tionghoa Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Tan, Mely G. *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Tim Penyusun INTI. “*Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan 1999-2009*”. Jakarta: INTI, 2009.
- Victor Silaen, “*Cina Jadi Tionghoa*”, dalam *Reformata*, April 2014.

Widjajanti W. Dharmowidjono. “Not our fate: Reseacher unearths roots of racism against Chinese-Indonesians”, diakses pada 11 Februari 2024 dari <https://www.thejakartapost.com/life/2021/05/26/not-our-fate-researcher-unearths-roots-of-racism-against-chinese-indonesians.html>, 31 Mei 2021.

Winarta, H. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009. www.inti.or.id, diakses tanggal 20 Maret 2017.

Yow, Valerie Raleigh. *Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences*, Second Edition. Lanham: Altamira Press, 2005.

Wawancara:

Michael Purnama Utama. Sekjen INTI periode 1999-2005.

Gilbert Wiryadinata. Pendiri, Penggagas, dan Anggota tetap INTI periode 1999-2005.

Nancy Widjaja. Pendiri. Anggota Aktif INTI tahun 1999-2005, Ketua PINTI (Perempuan INTI) periode 2003-2013.